



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan perubahan IKU Tahun 2011-2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Penetapan IKU Tahun 2017-2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan format keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan Perubahan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.
- (3) Penetapan IKU PD berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.
- (4) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*out put*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (5) Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD juga mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 060/286/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Februari 2017
BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2016

MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD	
						Kepegawaian		
1.1	Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah	1.1.1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Rasio PNS Lulusan S1	%	Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin	Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja	Program Pendidikan Kedinasan	BKD
			Rasio PNS Lulusan S2/S3	%				
						Perencanaan Pembangunan		
1.2	Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1.2.1 Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tdk	Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD	Program Pengembangan data/informasi	Bappeda
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tdk			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tdk			Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
								Statistik	
		1.2.2	Tersedianya data, informasi, statistik yang akurat dan up date	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tdk	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Mengembangkan data/informasi/statistik daerah	Program Pengembangan data/informasi/statistik	Bappeda
								Pemerintahan Umum	
		1.2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	%	Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan	Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
1.3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	1.3.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan ekonomi	%	Penataan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	Menata dan memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bappeda
				Laju inflasi kabupaten	-			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Bappeda
				PDRB per kapita	-			Program penataan	Bappeda
				Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%				Bappeda
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%				Bappeda

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak				BPPTPM
				Sistem informasi manajemen pemda	sistem				Dinhubkominfo
				Penyelesaian ijin lokasi	%				BPPTPM
1.4	Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	1.4.1	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya jumlah PAD	Rp. Milyar	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan dan Optimalisasi Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPKKD
								Kearsipan	
1.5	Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah	1.5.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Pengelolaan arsip secara baku	skpd/desa/kecamatan	Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	KPA
								Kependudukan dan catatan Sipil	
1.6	Meningkatkan Pelayanan Publik	1.6.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
				Rasio bayi berakte kelahiran	%	Pengendalian Kependudukan	Meningkatkan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Dindukcapil

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
								Komunikasi dan Informatika	
		1.6.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	Web site milik pemerintah daerah	ada/tidak				Dinhubkominfo
								Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1.7	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.7.1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	per 10000	Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menjaga, Memelihara dan Memantapkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesbangpol Linmas, Satpol PP
				Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10000			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol Linmas
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%				Kesbangpol Linmas, Satpol PP
				Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali				Satpol PP
1.8	Tujuan : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	1.8.1	Menurunnya jumlah korban bencana	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik		Peningkatan Kesadaran Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
--------	---------	---------------------------	--------	----------	-----------	---------	------

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, SERTA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		SKPD	
						Pendidikan		
2.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	2.1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Peningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan daya dukung, pemerataan, mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dindikpora
			Angka partisipasi kasar			Meningkatkan daya dukung pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan informal	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dindikpora
			- APK SD/MI	%			Program Pendidikan Non Formal	Dindikpora
			- APK SMP/MTs	%		Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikpora
			- APK SMA/MA/SMK	%			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dindikpora
			Angka Partisipasi Murni :			Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dindikpora
			- APM SD/MI/Paket A	%				Dindikpora
			- APM SMP/MTs/Paket B	%				Dindikpora

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				- APM SMA/SMK/MA/Paket C	%				Dindikpora
				Pendidikan dasar:					Dindikpora
				Angka partisipasi sekolah	%				Dindikpora
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					Dindikpora
				Rasio guru/murid					Dindikpora
				Pendidikan menengah:					Dindikpora
				Angka partisipasi sekolah	%				Dindikpora
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah					Dindikpora
				Rasio guru terhadap murid					Dindikpora
				Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)					Dindikpora
				Fasilitas Pendidikan:					Dindikpora
				Ruang kelas kondisi baik	%				Dindikpora
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					Dindikpora
				Pendidikan Anak Usia Dini	%				Dindikpora
				Angka Putus Sekolah:					Dindikpora
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%				Dindikpora
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%				Dindikpora

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%				Dindikpora
				Angka Kelulusan:					Dindikpora
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%				Dindikpora
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%				Dindikpora
				Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%				Dindikpora
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%				Dindikpora
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%				Dindikpora
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%				Dindikpora
Kesehatan									
2.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi	tahun	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
				Angka usia harapan hidup	tahun			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
				Persentase balita gizi buruk	%			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinkes
Sosial									

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
2.3	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	2.3.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial			Meningkatkan pembinaan PMKS dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial	Program Pembinaan Anak Terlantar	Dinsosnakertrans

MISI 3: MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, UMKM DAN PARIWISATA

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		
								Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.1	Meningkatkan peranan koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan dalam perekonomian daerah	3.1.1	Meningkatnya kapasitas Koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan	Persentase Koperasi Aktif	%	Peningkatan akses koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Disperindagkop & UMKM, Setda - Perekonomian
				Usaha Mikro dan Kecil	%			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Disperindagkop & UMKM, Setda - Perekonomian
								Pertanian	
3.2	Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	3.2.1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)	ku/ha	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian/perkebunan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian/perkebunan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dipertan, Bappeluh KP
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/pe ternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%)	%			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dipertan, Bappeluh KP

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)	%			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dipertan, Bappeluh KP
				Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	%			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dipertan
		3.2.2	Meningkatnya produksi peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)		Peningkatan produksi, pemasaran dan pengendalian penyakit peternakan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dipertan
								Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dipertan, Bappeluh KP
								Ketahanan Pangan	
		3.2.3	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	%	Divesifikasi produk dan pengelolaan konsumsi pangan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dipertan, Bappeluh KP
		3.2.4	Meningkatnya produksi hasil kehutanan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan	Meningkatkan pembinaan usaha kehutanan dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dipertan
								Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.2.5	Meningkatnya sumberdaya energi dan mineral	Rasio ketersediaan daya listrik	%	Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan	Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPUPPE
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%				DPUPPE

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD		
						Kelautan dan Perikanan			
		3.2.6	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan	ton	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinlutkan
						Perindustrian			
		3.2.7	Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku IKM dan industri besar	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Disperindagkop & UMKM
				Pertumbuhan Industri	%			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Disperindagkop & UMKM
						Perdagangan			
3.3	Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah	3.3.1	Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Peningkatan kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen	Meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Disperindagkop & UMKM
						Pariwisata			
		3.3.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata	%	Peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Diparbud
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp Ribu			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Diparbud

MISI 4 : MENDORONG INVESTASI DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
						Penanaman Modal	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
4.1	Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja	4.1.1	Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPPTPM
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp 000.000)	Rp juta			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPPTPM
								Tenaga Kerja	
		4.1.2	Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
				Tingkat partisipasi angkatan kerja	%				Dinsosnakertrans
				Tingkat pengangguran terbuka	%				Dinsosnakertrans

MISI 5: MENINGKATKAN KERUKUNAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	SKPD
5.1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama	5.1.1	Meningkatkan aktivitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	Peningkatan penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama	Meningkatkan penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-niali agama	Sosial SETDA- BAGIAN KESRA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
--------	---------	---------------------------	--------	----------	-----------	---------	------

MISI 6: MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD		
						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
6.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak	6.1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	%	Percepatan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	KP2PA
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	%				KP2PA
		6.1.2	menurunnya % jml pekerja di bawah umur	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	%			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KP2PA
		6.1.3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%			Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	KP2PA
		6.1.4	Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan	Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 s/d 24 tahun (%)	%				Dindikpora
		6.1.5	Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan & anak	Rasio kekerasan terhadap anak	%				KP2PA

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
								Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	6.2.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana	Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB	Program Keluarga Berencana	Bapermas KB
		6.2.2	Menurunnya jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Bapermas KB

MISI 7: MENGEMBANGKAN POTENSI PEMUDA, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		SKPD
								Pemuda dan Olahraga	
7.1	Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional	7.1.1	Menurunnya kasus kenakalan remaja/tawuran antar pelajar	Presentase Remaja Bebas Narkoba	%	Strategi : Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship	Kebijakan : Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Dindikpora
		7.1.2	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kali	Strategi : Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship	Kebijakan : Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dindikpora
		7.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan	Jumlah klub olahraga	unit	Strategi : Peningkatan budaya dan prestasi olahraga	Kebijakan : Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dindikpora

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
		7.1.4	Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga	Jumlah Kegiatan Olahraga	unit			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dindikpora
								Kebudayaan	
7.2	Berkembangnya dan terlestarinya seni dan budaya daerah, bangunan bersejarah serta cagar budaya sebagai identitas bangsa	7.2.1	meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional	Jumlah grup kesenian	drup	Strategi : Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Kebijakan : Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai-nilai budaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinparbud
				Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinparbud
		7.2.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%				Dinparbud

MISI 8: MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	SKPD
								Pekerjaan Umum

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
8.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung aktivitas ekonomi dan sosial	8.1.1	Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur	Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPUPPE
				Rasio Jaringan Irigasi	%			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPPE
				Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DPUPPE
		8.1.2	Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan	Jumlah pembangunan infrastruktur kelurahan	%	Peningkatan daya dukung dan pemerataan infrastruktur perdesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	DPUPPE, Kecamatan, Kelurahan
				Jumlah pembangunan infrastruktur antar desa	%				DPUPPE, Kecamatan,
								Perumahan	
		8.1.3	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya	Rumah tangga pengguna air bersih	%	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan	Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	DPUPPE
				Rumah tangga ber-Sanitasi	%				DPUPPE
				Lingkungan pemukiman kumuh	%				DPUPPE

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Rumah layak huni	%				DPUPPE
								Perhubungan	
		8.1.4	Meningkatnya fasilitas perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinhubkominfo
				Rasio ijin trayek	%			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinhubkominfo
				Jumlah uji kir angkutan umum	%			Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinhubkominfo
				Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	%			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinhubkominfo
				Angkutan darat	%			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Dinhubkominfo
				Kepemilikan KIR angkutan umum	%			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dinhubkominfo
								Lingkungan Hidup	
8.2	Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	8.2.1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah	%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	KLH, DPUPPE
				Pencemaran status mutu air	%			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	KLH

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	KLH
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%		Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	KLH
				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	KLH
				Penegakan hukum lingkungan	%				KLH
								Perencanaan Pembangunan	
8.3	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi terhadap rencana pembangunan daerah	8.3.1	Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan antardaerah, antara daerah dengan swasta / lembaga	Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (%)	%	Peningkatan kerjasama pembangunan antardaerah, antara daerah dengan swasta / lembaga	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana kerjasama pembangunan daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
		8.3.2	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perkotaan	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan	%	Peningkatan ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Bappeda
		8.3.3	Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	%	Peningkatan ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bappeda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
--------	---------	---------------------------	--------	----------	-----------	---------	------

MISI 9 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN -KAWASAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		SKPD	
						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
9.1	terwujudnya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain	9.1.1 meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan desa	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Bapermas KB
			LPM Berprestasi	%				Bapermas KB
			PKK aktif	%				Bapermas KB
			Posyandu aktif	%				Bapermas KB
			Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan	%				Bapermas KB
							Penataan Ruang	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
9.2	Meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	9.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	Pendayagunaan rencana tata ruang	Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Bappeda
				Luas wilayah produktif	%			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bappeda
				Luas wilayah industri	%				Bappeda
				Luas wilayah perkotaan	%				Bappeda

MISI 10 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		SKPD
								Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
10.1	Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	10.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Demokrasi dan Penegakan Hukum	Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Hukum yang Bertanggungjawab	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol Linmas
		10.2	Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu	Jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR per jumlah parpol peserta pemilu	Kali			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol Linmas

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
--------	---------	------------------------------	--------	----------	-----------	---------	------

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017-2021

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi	Kondisi	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				Awal 2015	Akhir 2021					
1	Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan peran FKUB dalam kerukunan antar umat beragama	Pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Kesbangpol
2	Mewujudkan reformasi birokrasi	Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	%	8,26	11,62			Program kepegawaian	Urusan Penunjang	BKPP
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatnya nilai LKJIP	Indeks	C	A	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan	Reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kualitas ASN dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring evaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, dan transparan	Program perencanaan pembangunan daerah	Urusan Penunjang : Perencanaan, Setda, Keuangan, Inspektorat, Kepegawaian	Bappeda litbang, Inspektorat, Bagian Orpeg Setda, BPKPAD
			Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah	Nilai opini BPK	Indeks	WDP	WTP (Untuk LKPD 2021)	Meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui peningkatan kualitas penganggaran, pelaksanaan pembangunan, peningkatan sistem keuangan daerah dan pengelolaa aset daerah	Peningkatan kinerja keuangan difokuskan pada pengelolaan aset daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan, Inspektorat, Perencanaan	BPKPAD, Bappeda Litbang, Inspektorat
										Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Keuangan, Inspektorat, Setda	BPKPAD, Bappeda Litbang, Setda

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD	
		Tujuan				2015	2021						
			Terwujudnya Smart City	Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	Unit Sistem	0	6	Mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pemberi pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik	Mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal, kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggu-langan kemiskinan), Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan <i>Smart city</i>	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
3	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Produktivitas padi	kw/ha	66,27	68,81	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penerapan teknologi tepat guna, mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan, peningkatan kapasitas sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan dan kelmbagaan petani, pekebun dan peternak, peningkatan jumlah sentra peternakan rakyat, optimalisasi peran dan fungsi rumah potong hewan, pengendalian dan pengawasan peredaran	Intensifikasi dan optimasi lahan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian ditingkat poktan/gapoktan, pengaman pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam (banjir, kekeringan perlindungan plasma nutfah pertanian dan varietas lokal unggulan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga petani pengembangan komoditas perkebunan tahunan pada lahan kritis dan kawasan lindung dalam upaya perlindungan tanah	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinprtan Pangan	
				Produksi pertanian tanaman pangan utama								Pertanian	Dinprtan Pangan
				Padi	ton	653.547	678.585					Pertanian	Dinprtan Pangan
				Jagung	ton	167.7	260.699					Pertanian	Dinprtan Pangan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
				Kacang hijau	ton	35.33	39.285	hewan ternak, peningkatan promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan unggulan daerah dan pengendalian laju pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian.				Dinprtan Pangan
			Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	ton	5.511	6.1	Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana prasarana, pelatihan kapasitas, dan peningkatan kualitas TPI .		Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	skore	91,4	92,30	Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan melalui penyediaan lumbung, pemanfaatan pekarangan, keanekaragaman pangan, dan pengawasan bahan pangan	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada kemandirian pangan, dan keamanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Ketersediaan pangan Utama	ton	388.304	403.18			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0,6	0,75	Meningkatkan perkembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan ketrampilan industri kecil dan menengah, peningkatan akses jejaring pemasaran, pemanfaatan teknologi	Pengembangan industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk produk unggulan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinnakerind

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
			Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL	Persentase lokasi PKL yang ditata	%	20	50	dan membangun sentra-sentra industri	Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persyaratan dan penataan PKL	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Perdagangan	Dindagkop UMKM
				Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	0	25			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dindagkop UMKM
				Nilai bersih ekspor perdagangan	Rp (juta)	15.175.038	20.336.002			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Dindagkop UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,20	2,5	Meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi melalui peningkatan ketrampilan usaha pada UMKM, peningkatan ketrampilan managerial koperasi, memberikan akses jejaring pemasaran dan permodalan	Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dindagkop UMKM
				Persentase koperasi aktif	%	79,5	84		Peningkatan kualitas koperasi difokuskan pada pengembangan koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Dindagkop UMKM
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	PDRB per Kapita	Menurunnya angka pengangguran	TPT (tingkat Pengangguran Terbuka)	%	6,02	4,77	Pengurangan tingkat pengangguran melalui pemberian pelatihan bagi calon tenaga kerja, pelaksanaan bursa kerja, meningkatkan kapasitas lembaga ketrampilan kerja dan membuka jejaring dalam penempatan tenaga kerja	Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenaga kerjaan	Dinakerind
										Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Dinakerind
	Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan	Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	JumlahPendapatan dari sektor pariwisata	Rp	1,430 M	1,600 M	Meningkatkankan daya saing pariwisata melalui pembukaan destinasi baru, peningkatan promosi pariwisata, memperkuat kelompok sadar wisata, dan meningkatkan event event pariwisata	Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan destinasi baru	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
										Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
4	Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	90,54	96,54	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan baik jalan antar desa maupun kabupaten, peningkatan kualitas jaringan irigasi, dan peningkatan kualitas drainase.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	52,26	58,26			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	90,16	90,21			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	86.426	82.334	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan jaringan untuk PDAM, PAMSIMAS, pengelolaan sampah 3R, penambahan sarana prasarana persampahan, penataan kawasan kumuh	Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman sehat di fokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi dasar.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	3,893	8	ruang dan meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang melalui penyediaan informasi mengenai tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau dan mempertahankan sawah lestari (LP2B: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang difokuskan pada revisi RTRW, penyusunan dokumen RTR lainnya dan penyediaan ruangterbuka publik serta mempertahankan LP2B.	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kabupaten dan nasional)	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	30	100	Peningkatan kualitas transportasi melalui penyediaan sarana angkutan umum pada semua jaringan jalan, penyediaan angkutan pada setiap jaringan jalan, penyediaan rambu rambu lalu lintas, dan kesadaran berlalu lintas yang baik	Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan angkutan pada akses atau jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu lalu lintas.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal.	Angka Harapan lama sekolah	tahun	12,43	14,50	Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengurangi jumlah anak yang seharusnya sekolah tetapi tidak sekolah, penyediaan sarana dan prsarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dan penyediaan beasiswa bagi	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prsarana pendidikan dan pengurangan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatkan minat baca masyarakat	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	%	5.31	6,42	Peningkatan minat baca melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah maupun masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan mutu dan jenis bahan bacaan	Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan kunjungan pemustaka	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	per 100.000 klh	106,75	100	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, rujukan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan peran masyarakat, swasta	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				AKB (Angka Kematian Bayi)	per 1000 klh	7,5	7,0			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		Dinas Kesehatan
				Prevalensi Gizi Buruk	%	1,5	1,0			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
				Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	per 40.000 penduduk					Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk					Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan
	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatnya Persentase PMKS yang ditangani	%	14,74	29,7	Peningkatan penanganan PMKS melalui pemberian jaminan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, penguatan TKSK, PSKS dan peningkatan peran masyarakat serta swasta	Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, Program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsosp2pa
										Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Dinsosp2pa
										Program Peningkatan Jaminan Sosial		Dinsosp2pa
										Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma		Dinsosp2pa
										Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)		Dinsosp2pa

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
6	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminilitas yang ditangani	Menurunnya angka kriminalitas	Angka kriminilitas yang ditangani	%	61,70	68,00	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana linmas, satpol PP, peningkatan, peningkatan pratoli satpol PP pada daerah rentan dan peningkatan penegakan perda.	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan.	Program pemeliharaan ka	Ketertiban, kamanan dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
7	Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.	Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah medali olahraga yang diterima	Unit	100	173	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga melalui peningkatan sarana prasarana olahraga dan kreativitas pemuda, pencarian bibit bibit berprestasi, peningkatan mutu pelatih, pemberian ketrampilan kewirausahaan pemuda	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi olahraga unggulan dan prestasi wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dinpora
				Presentase organisasi pramuka aktif	%							Dinpora
	Mengembangkan potensi kesenian lokal	Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya	Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal	Jumlah event kesenian	Unit	2	5	Pengembangan potensi kesenian lokal melalui peningkatan pembinaan kelompok seni, dan peningkatan event event kesenian.		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dindikbud
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,2	2,06	Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui peningkatan peran PUS dalam berKB, pemberian alat kontrasepsi jangka panjang	Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga	Program Keluarga Berencana	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinpermasdes dalduk p2 kb

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	IPG	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	15	25	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penyiapan kapasitas desa dalam pengelolaan dana desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi da	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinpermasdes dalduk p2 kb
		IDG	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	50	35	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dengan memberikan ketrampilan, peningkatan keaktifan lembaga perlindungan peremp- puan dan anak, peningkatan kesadaran masyarakat	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan dan anak	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	Dinsosp2pa
				Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	Kasus	25	15			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinsosp2pa
										Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Dinsosp2pa
8	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA	US\$.000	34.812,30	61.672,11	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan PTSP, peningkatan promosi, dan pemberian insentif bagi investor	Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan pada PTSP	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Din PM PTSP
				Nilai Investasi PMDN	Rp	2.034.874	2.181.366			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Din PM PTSP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	Nilai	70,39	84,53	Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas Perangkat daerah dalam memberikan pelayanan, penyusunan SOP, dan SP	Peningkatan pelayanan public difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian pelayanan di SKPD yang memberikan pelayanan publik	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Pelayanan Publik	Bagian Orpeg-Setda
										Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Bagian Orpeg-Setda

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Urusan	PD
		Tujuan				2015	2021					
9	Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Penghargaan Kota Terbersih	Indeks	Belum Adipura	Adipura	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengawasan intensif pada perusahaan yang memberikan potensi terjadinya pencemaran, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen AMDAL pada perusahaan, pengelolaan 3R, rehabilitasi keanekaragaman hayati, penanganan lahan kritis dengan penanaman kembali, peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan kebersihan kabupaten	Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota perbaikan kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLH
				Luas tutupan lahan oleh vegetasi untuk menjaga iklim mikro	Ha	5	25,055			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLH

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2011-2016

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (nama PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN DEMAK NOMOR : / / /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama
PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN DEMAK
KEPALA (.nama PERANGKAT DAERAH...) KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Demak, setiap Perangkat Daerah wajib
menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama
PERANGKAT DAERAH...);
b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama
PERANGKAT DAERAH...).

Mengingat : 1.
2.
3.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama PERANGKAT
DAERAH...) Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (...nama PERANGKAT DAERAH...) Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)(...nama PERANGKAT DAERAH...) Kabupaten Demak Tahun 2017-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KEPALA (...nama PERANGKAT DAERAH...)
Kabupaten Demak

(Nama lengkap dan gelar)
(golongan dan NIP)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
 DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.....nama PERANGKAT
 DAERAH..)

Nama PERANGKAT DAERAH :

Tugas :

Fungsi : 1.
 2.
 3. Dst.

No	Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama PERANGKAT DAERAH	Bidang Urusan	Sumber Data	Keterangan

KEPALA (...nama PERANGKAT DAERAH...)
 Kabupaten Demak

(Nama lengkap dan gelar)
 (golongan dan NIP)

BUPATI DEMAK,

TTD
 HM.NATSIR